

Dasar Hukum

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 Telepon/Faksimile (0536) 3229819

Laman <u>www.disdagperinprovkalteng.com</u>, Pos-el perindagkalteng@gmail.com

Nomor SOP	: SOP – PPID - 002
Tanggal Pembuatan	: 01 – 05 - 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 02 – 05 - 2025
Disahkan Oleh	Kepala Fredagangan Dan Perindustrian Provins Kalimantan Tengah  CRH N. S.Sos, M.AP  Utama Muda  12. 192 0626 199003 2 009

## SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana

1.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1.	Memiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan serta peraturan
2.	Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan		lainnya tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
	Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;	2.	Mampu melakukan koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja dalam
3.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		mengumpulkan, Menyusun, menyediakan dan mendokumentasikan informasi;
4.	PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	3.	Mampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat, dan akurat
	Keterbukaan Informasi Publik;		menurut jenisnya;
5.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	4.	Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna
	Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik		layanan;
	Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026). Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang	5.	Mampu mengoperasikan komputer dan internet
	Standar Layanan Informasi Publik;	6.	Mampu bekerja sama dalam tim
6.	Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;		
7.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan		
	Susunan Perangkat Daerah;		
8.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar		
	Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi		
	Kalimantan Tengah.		
Ket	erkaitan	Pe	ralatan/Perlengkapan
1.	SOP Pengumuman	1.	Komputer/Laptop
2.	SOP Permintaan Informasi Publik	2.	Internet
3.	SOP Pengajuan Keberatan	3.	Alat Tulis Kantor
4.	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi	4.	Printer/mesin fotokopi
5.	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	5.	Telepon
6.	SOP Maklumat Pelayanan	6.	Papan Pengumuman
7.	SOP Pengujian Konsekuensi	7.	Nota Dinas/Lembar Disposisi
		8.	Formulir Permohonan Informasi/Keberatan
Per	Peringatan		ncatatan dan Pendataan
•	Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan	•	Dicatat dalam Buku Register Permintaan Informasi Publik
	penyusunan dan kualitas laporan		

## SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

		Pelaksana							
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas PPID	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Pendukung Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengajukan permohonan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan yang dibutuhkan.					<ul> <li>Formulir         pengajuan         keberatan         informasi publik         <ul> <li>Fotokopi kartu</li> <li>identitas pemohon</li> </ul> </li> </ul>	Pada Hari dan Jam Kerja	Formulir pengajuan keberatan informasi public yang telah diisi dan dilengkapi kartu identitas dari pemohon.	
2.	Melakukan registrasi formular pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu.					Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada Hari dan Jam Kerja	Daftar pengajuan	
3.	Memeriksa pengajuan formular keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID Pembantu					Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada Hari dan Jam Kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi public yang telah dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
4.	Menganalisa pengajuan formular keberatand ari para pemohon informasi dan memerintahkan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi.			TIDAK		Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang sudah di isi lengkap	dan Jam	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	

5.	Memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi.	Y	/A	<ul> <li>Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang sudah di isi lengkap</li> <li>DIP yang telah diumumkan</li> </ul>	Pada dan Kerja	Jam	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permohonan informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi	
6.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasa PPID, jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP, atasan PPID yang akan menjawab			Dokumen informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau dokumentasi surat penolakan dari PPID atau PPID pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan.	dan	Jam	Informasi public yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi.	

KEPALA DINAS
GANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN
PERINDUSTRIAN

Pembina Utama Muda NIP. 19670626 199003 2 009